

# PENDEKATAN KULTURAL DALAM PROSES REINTEGRASI BANGSA

T. Jacob\*)

*Kebudayaan berperan dalam disintegrasi bangsa, maka tentu dapat berperan pula dalam reintegrasi. Kita ketahui, kebudayaan adalah segala hasil karya manusia, baik berupa benda maupun nir-benda. Kalau kita sebut hasil karya, maka terliput ke dalamnya prosesnya, produknya dan interaksi antara pendukung-pendukung kebudayaan itu. Biasanya orang membayangkan kesenian, fine arts, kiat dan kria, kalau mendengar kata kebudayaan. Tingi-rendahnya kebudayaan dapat dilihat pada gaya hidup masyarakat, pemukiman, mata pencaharian, pengaturan dan pengatur, pengangkutan, pertahanan dan keamanan, pendidikan, pembuangan sampah dan kotoran, pengobatan, penggunaan waktu senggang, dan kepercayaan, di samping kesenian.*

Dunia manusia adalah dunia yang multietnis, multireligius dan multilingual, dan seperti hewan-hewan, manusia juga polimorfis, ciri-ciri ragawinya bervariasi sehingga membentuk sub-ras dan ras. Tidak pernah ada dua orang yang sama (identik), baik sekarang, dahulu kala dan di masa yang akan datang. Manusia dari lahir sampai mati hidup dalam *kebhinnaan* (diversitas), baik diversitas biologis maupun kultural. Sebagian besar negara-bangsa itu etnis heterogen, hanya 45 dari 164 negara

yang dapat disebut homogen. Negara kita terdiri atas beberapa ratus etni (*l'ethnie, der Ethnie*), dan boleh dikatakan tidak ada propinsi yang homogen. Untuk mendapat propinsi yang homogen, propinsi harus dipecah-pecah, bahkan kabupaten pun ada yang harus dipecah. Akan tetapi mini propinsi demikian tentu saja tidak viabel (dapat hidup) dalam kecenderungan dunia ke arah globalisasi.

Acap kali orang berbicara tentang kebudayaan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, ke-

---

\* Prof. Dr. T. Jacob, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Kepala Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

pribadian nasional, asas tunggal, menunggal (= menjadi tunggal), menyatukan bahasa dan lain-lain. Kebudayaan nasional menurut penulis sedang terjadi (*status nascens*) dan tidak akan terdiri dari kompleks ciri yang terbaik saja, tetapi dari segala varian. Kebudayaan Indonesia adalah mosaik, pluralistik, dengan persamaan dalam intinya (*cultural core*). Oleh karena itu yang kita coba capai dan pelihara adalah persatuan bangsa dan kesatuan tanah air. Bahwa pada waktu bangsa Indonesia akan homogen akibat mobilitas dan interaksi yang intensif antara berbagai daerah, dan tercapai satu kebudayaan Indonesia dengan baurannya mosaik, masih memerlukan waktu yang lama.

Asas tunggal yang sama benar juga sulit dicapai selama kebebasan berpikir masih ada dan diversitas alamiah terpelihara. Kepribadian nasional juga tidak dapat dipaksakan, ia terbentuk sendiri oleh pengalaman historis dan ekologis. "Menyatukan bahasa" dalam satu usaha tidak perlu bersifat nasional. Kita harus belajar menikmati manfaat perbedaan. Sekumpulan yang uniform dan monotipis tidak akan bertahan lama; yang lebih unggul dalam *survival* adalah kumpulan yang bervariasi. Sukar dibayangkan sebuah negeri dengan 17.000 pulau yang teren-

tang sepanjang 4.000 km, geografi dan sejarah yang berbeda, lingkungan yang bervariasi, penduduknya yang lebih 200 juta, dapat sama secara biokultural.

### Integrasi dan Disintegrasi

Penjajahan Belanda, yang dimulai oleh eksplorator-eksplorator dari Portugis dan Belanda, meskipun awalnya, lamanya, dan pengaruh militer, politik, ekonomi dan agamanya tidak sama, dengan tidak sengaja telah mempersatukan sebagian besar kepulauan Nusantara dan membuat bahasa Melayu, sebagai bahasa pengantar dalam interaksi ekonomi, politis, dan agama, *de facto* menjadi bahasa Indonesia. Interaksi antara suku bangsa terjadi melalui awak kapal, tentara, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, pembuangan dan penghukuman di luar daerah, penyebaran agama dan lain-lain.

Meskipun Jepang memakai prinsip autarki, agar setiap pulau dapat berdiri sendiri dalam dinamika perang, ia membantu menyebarkan bahasa Indonesia. Maka pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia, proklamator dapat memami bahasa Indonesia dan dipahami oleh hampir semua orang. Pemimpin-pemimpin pertama Republik In-

donesia mengetahui benar bahwa pembinaan bangsa masih harus dipentingkan, karena lebih sulit daripada pembinaan negara. Melihat derajat diversitasnya, bangsa Indonesia lebih mudah diceraiberaikan daripada disatu-padukan. Tetapi dapat dimengerti, bahwa awal kemerdekaan tidak segala institusi budaya dikembangkan dalam pembinaan bangsa.

Di zaman Orde Baru secara verbal perpaduan bangsa sangat ditekankan, tetapi sayang, secara aktual diabaikan. Dalam penggunaan sumber daya alam dan hutang, pemerintah sangat miopis, tetapi sebaliknya dalam eksploitasi, sehingga ketimpangan dalam pembangunan sangat mencolok. Ketimpangan ini malah digunakan sebagai bahan melecehkan perifikasi oleh orang-orang pusat. Semangat *laissez-faire* berpengaruh berat sebelah, tidak pada etos kerja, tetapi pada etos laba, sehingga *the religion of greed* mempengaruhi semangat eksekutif.

Puncak atau pangkal disintegrasi adalah ketidakadilan pusat-daerah, sentrum-periferi. Pusat seolah-olah memisahkan dirinya dari periferi, bahkan semi-periferi, disertai sentralisma yang sangat kuat. Separatisme sebenarnya adalah reaksi terhadap sentralisma itu. Keadaan dapat tenang, oleh karena pusat mem-

punyai *proxy* yang setia di daerah. Sebaliknya pusat sendiri adalah *proxy* dari kekuatan-kekuatan pasar dunia. Dunia adalah milik pemenang, dan pemenang biasanya kuat serta jumlahnya banyak. Mayoritas dalam suatu negara atau propinsi akan dominan, dan yang berlaku dalam kehidupan adalah *the wisdom of the dominant group*.

Akan tetapi golongan minoritas senantiasa berusaha mengekspresikan dirinya, ingin kebudayaannya independen sampai tingkat tertentu dari kebudayaan dominan. Mayoritas tentu juga berusaha demikian, tetapi usaha mereka tidak kentara sebagai usaha unik atau aneh, dan tak kelihatan provinsialistis. Minoritas juga ingin melestarikan kebudayaan mereka, supaya mereka tidak merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka.

Kalau kita telaah sebab-sebab pokok yang menimbulkan separatisme adalah pertama-tama ketidakadilan: (1) dalam sumbangan dan peroleh, (2) dalam partisipasi sosial, ekonomis dan politis, (3) dalam mengambil keputusan, memikul risiko dan menikmati hasil dan (4) dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan (*cultural injustice*).

Beberapa kasus dapat disebut di bawah ini yang menjadi iritasi dalam hati daerah-daerah yang menunjukkan kecende-

rungan separatisma, antara lain: (1) eksploitasi berlebihan sumber daya alam yang dipergunakan terutama oleh pusat dan sekitarnya serta perusahaan-perusahaan besar asing, sedangkan penduduk setempat tidak menikmati hasilnya, tetapi malah menerima pencemaran dan perusakan lingkungan. Rakyat yang miskin di pusat dan daerah-daerah miskin juga tidak kebagian. (2) Tenaga-tenaga yang dipakai banyak berasal dari luar daerah, sehingga lulusan dari daerah juga harus ke pusat untuk melamar. (3) Pembangunan dirancang di pusat dan bersifat sektoral, sehingga prasarana dan sarana di daerah tidak dapat maju-maju. (4) Koinsidensi batas-batas etnis, daerah dan agama serta kemakmuran makin mempersulit keadaan dan menambah ketidakpuasan. (5) Terjadi diskriminasi yang mungkin tidak disengaja dalam pendidikan, lapangan kerja dan kesempatan kerja. (6) Terdesaknya budaya etnis lokal oleh dominansi cara berpikir mayoritas, seperti dalam pemberian nama tempat di daerah transmigrasi, nama-nama gedung nasional, P4, gaya kerja, perilaku birokrasi, media elektronik dan lain-lain.

Perlu diingat bahwa etnisisme sukar sekali dibasmi dan sebabnya juga tidak perlu. Yang perlu dikuatirkan adalah egosen-

trisma etnik atau etnosentrisme, apalagi kalau menjurus ke arah etnonasionalisme. Hak menentukan nasib sendiri secara kategoris sering dipakai sebagai alasan separatisma dan tuntutan merdeka (mempunyai negara sendiri); kalau ini dapat dipuaskan dengan hak akan kebudayaan sendiri yang independen atau tidak seluruhnya dependen pada kebudayaan yang dominan tidak menimbulkan masalah. Bangkitnya kembali etnisitas (*ethnic revival*) malah baik di zaman globalisasi untuk menjaga keseimbangan.

### Reintegrasi

Usaha-usaha untuk reintegrasi haruslah komprehensif holistik, meliputi pendekatan melalui berbagai institusi budaya. Yang paling utama adalah mengembalikan keadilan sebagai dasar kerja dalam pemerintahan dan masyarakat. Untuk menyatakan ini hanya diperlukan sedikit waktu, tetapi untuk melaksanakannya diperlukan waktu yang lama.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil antara lain sebagai berikut.

(1) Memajukan daerah-daerah terkebelakang dengan memaknai prinsip keadilan maksimum, jadi daerah yang paling terkebelakang yang dibangun

lebih intensif, agar ketidaksetaraan dapat diminimasi. Upaya memajukan ini mencakup pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana kesejahteraan.

(2) Pelestarian kebudayaan etnis harus *in situ* dan *in vivo*, termasuk bahasanya, banyak di antaranya yang sudah atau hampir punah. Jadi jangan dilestarikan *ex situ* dan *in vitro*, sebagai perkampungan asli, di museum dan di pusat, tetapi dibiarkan hidup dalam masyarakat. Bahasa yang hampir punah dipelajari dengan prioritas tinggi dan buku-buku (termasuk kamus) diterbitkan, agar kekayaan kebudayaan kita terpelihara.

(3) Pembatasan kelahiran harus memikirkan angka kelahiran dan angka kematian serta kepadatan penduduk, jangan disamaratakan untuk seluruh negeri. Istilah transmigrasi sebaiknya dibuang saja, kecuali bagi migran dalam transit (seperti dari Irak atau Bangladesh ke Australia). Migran internal diperlakukan sebagai penduduk biasa. Nama-nama tempat yang baru sebaiknya dalam bahasa lokal (kecuali kalau sukar dilafalkan secara nasional) atau dalam bahasa nasional.

(4) Hak-hak manusia harus dilindungi, intraetnis dan interetnis. Kekerasan yang berasal ekstraetnis terasa lebih menyakitkan, dan kalau dilakukan oleh

aparatus keamanan, terjadilah konflik diagonal yang lebih parah daripada konflik vertikal atau horizontal.

(5) Dalam pekerjaan pemerintahan, bahkan hubungan kemasyarakatan, etnosentrisme harus dihindari. Jangan kita menganggap kebudayaan etnis kita paling tinggi, terluhur dan harus diadopsi oleh suku-suku lain. Seharusnya sikap kita adalah kebudayaan kita paling baik untuk kita, tetapi suku lain akan menentukan sendiri apa yang baik baginya. Sebenarnya kebudayaan suatu kelompok adalah hasil adaptasi kelompok tersebut dengan lingkungannya dan telah menjadi faktor kohesif sesama anggotanya dalam jangka waktu yang lama.

(6) Perbedaan-perbedaan dalam ciri-ciri ragawi juga tidak menunjukkan tinggi rendah suatu ras atau sub ras. Suatu sub ras dapat memiliki suatu ciri yang lebih progresif di samping ciri lain yang lebih primordial, jadi mereka tak dapat dianggap lebih rendah dalam evolusi dan dihubungkan-hubungkan dengan primitivitas, bodoh, kasar, kejam, berpenyakit, dursila atau bermoral longgar, jahat, penipu, kotor atau berbau badan tak sedap. Suatu suku tidak mungkin bertabiat stereotipis, misalnya haus darah, lembek, malas, atau tak dapat diandalkan, sehingga

didiskriminasi dalam mencari kerja, masuk sekolah, atau diterima sebagai kerabat.

Etni yang miskin dan terkebelakang jangan diperolok-olok, tetapi justru harus diusahakan agar mereka sejahtera dan maju. Sejak dari kecil pada anak-anak harus sudah ditanamkan reseptivitas terhadap perbedaan dan tidak menilai seseorang dari ciri-ciri etnorasialnya. Wawasan yang luas dan kesempatan untuk mendapatnya harus dilakukan dengan memberi kesempatan interaksi di kalangan murid-murid dan dengan guru-guru antara suku, bacaan dan tugas ekstrakurikuler tentang daerah lain, perlawatan antara daerah, data etnografis melalui media audio-visual dan sebagainya.

(7) Dalam sejarah manusia banyak bangsa pernah dijajah atau menjajah. Ini harus diterima secara wajar, kita tak perlu bangga karena nenek moyang kita pernah menjajah dan tak perlu terus berkecil hati karena moyang atau kita sendiri pernah dijajah. Dosa moyang tidak diwariskan kepada anak-cucu.

(8) Gerakan separatisme bersenjata harus dihadapi dengan fleksibilitas. Gerakan itu disebut liar kalau tidak terorganisasi, teroris kalau membunuh dan merusak sembarang, pengkhianatan, pemberontakan atau makar kalau dilihat dari sudut hukum.

Dari pihak separatis, gerakan itu disebut pembebasan, menentukan nasib sendiri, jihad, atau usaha melepaskan diri dari penderitaan karena kesabarannya sudah habis.

(9) Sikap aparat keamanan terhadap separatis, janganlah meniru teroris, dan jangan membantu pemberontak dengan senjata, agar usaha pengamanan berlangsung lama. Tentara harus sadar bahwa mereka diberi tugas berisiko tinggi, dan jangan heran kalau maut menimpa. Jepang, Jerman, Uni Soviet dan lain-lain membunuh 10 orang musuh kalau seorang anggotanya mati. Amerika dan Jerman dapat membakar seluruh kampung. Tentara negara Pancasila tidak pantas meniru yang demikian. Yang harus dihukum adalah pemimpin dan panglimanya, bukan rakyat yang terjepit. Mencari kekayaan dalam operasi polisional juga tidak tepat dan hanya memperkuat posisi pemberontak.

## Penutup

Konflik etnis telah menelan kira-kira 12 juta korban sejak Perang Dunia II. Bertambahnya penduduk dunia menjadi 10 miliar pada akhir abad nanti serta kencangnya proses globalisasi oleh kemajuan teknologi dan informasi, dapat mengakibatkan